

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Mutu pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari aspek kurikulum, karena kurikulum merupakan bagian inti dari sekolah. Pernyataan ini dikemukakan oleh Alertycs dalam bukunya *Modern Elementary Curriculum* (1966) yang menyatakan bahwa “kurikulum merupakan seluruh program dan kehidupan di lingkungan sekolah sekolah, yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah”.

Hasan (2002) juga menyatakan bahwa “kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar”.

Kurikulum di Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang selalu berubah, dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Awal perjalanan kurikulum di Indonesia yaitu pada tahun 1947. Pada tahun 1947 Indonesia belum mempunyai kurikulum yang baku dikarenakan masih dalam tahap pembenahan konstitusi Negara. Indonesia hanya baru mempunyai Rencana Pelajaran (RPP) yang berisikan pembenahan sistem per sekolah pasca Indonesia merdeka, akan tetapi pembenahan ini baru dapat diterapkan pada tahun 1965 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 yang berisikan Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

Setelah berakhirnya kekuasaan orde lama pada akhir tahun 1965, keluarlah Ketetapan MPRS Nomor 17 tahun 1966 yang berisi tentang tujuan pendidikan membentuk manusia Pancasila sejati. Dua tahun kemudian lahirlah kurikulum 1968 yang merupakan kurikulum pertama di Indonesia. Kurikulum 1968 merupakan sebuah pedoman praksis pendidikan yang terstruktur pertama kali. Tujuan pendidikan menurut kurikulum 1968 adalah mempertinggi mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina fisik yang kuat dan sehat, kurikulum ini bersifat *correlated subject curriculum*.

Pada tahun 1975 lahirlah kurikulum yang menggantikan kurikulum 1968. Pada waktu itu kurikulum 1968 sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurikulum 1975 ini merubah hampir seluruh isi ketentuan yang ada pada kurikulum 1968 termasuk sifat kurikulum. Sifat Kurikulum 1975 adalah *integrated curriculum organization*.

Sebelum semua sekolah mengimplementasikan kurikulum 1975, kurikulum ini digantikan dengan kurikulum 1984 dikarenakan kurikulum ini tidak bisa mengejar kemajuan masyarakat. Kurikulum 1984 merubah pula seluruh isi ketentuan yang ada pada kurikulum 1975 dengan merubah sifat kurikulum menjadi *content based curriculum*. Ketika Kurikulum 1984 ini pun belum terimplementasikan oleh seluruh sekolah di Indonesia terjadi lagi perubahan pada tahun 1994, yang mengakibatkan tidak adanya pemerataan pendidikan dan mengakibatkan pendidikan menjadi sentralisasi yang hanya dapat dirasakan perkembangannya hanya di Ibu Kota Negara dan kota-kota besar Indonesia.

Latarbelakang kurikulum 1994 lahir dikarenakan kurikulum 1984 dianggap terlalu sarat beban. Kurikulum 1994 ini dianggap lebih terfokus dari kurikulum sebelumnya, dengan sifat kurikulum *objective based curriculum*, perubahan kurikulum ini merubah kembali isi ketentuan bahkan sampai pada penamaan jenjang pendidikan.

Ketika reformasi bergulir di Indonesia pada tahun 1998, kurikulum 1994 mengalami penyesuaian-penyesuaian dalam rangka mengakomodasi tuntutan reformasi. Oleh karena itu, muncul suplemen kurikulum 1994 yang lahir tahun 1999 dengan penyesuaian pada materi pelajaran pada setiap mata pelajaran.

Setelah kurikulum 1994 berakhir kemudian digantikan dengan kurikulum 2004 yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Kurikulum 2004 lahir dikarenakan tuntutan mutu pendidikan di Indonesia, banyak kalangan berpendapat bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. (*Kompas*, 16 Agustus 2005)

Lahirilah Kurikulum 2004 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Meskipun KBK sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project* tetapi pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal. Pemerintah sepertinya masih ragu-ragu untuk mengesahkan kurikulum ini dikarenakan banyak menuai kritik dari berbagai kalangan, baik para ahli pendidikan ataupun para praktisi pendidikan. Beberapa kritik terhadap kurikulum ini adalah :

- 1) Masih sarat dengan materi sehingga ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada kurikulum 1994 akan terulang kembali.

- 2) Pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional masih terlalu intervensi terhadap kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum tersebut.
- 3) Masih belum jelasnya pengertian kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikasi .
- 4) Adanya sistem penilaian yang belum jelas dan terukur.

(Kunandar, 2007)

Untuk menjawab berbagai kritikan terhadap kurikulum KBK, yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

KTSP merupakan salah satu inovasi terbaru yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan kurikulum pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dalam KTSP Pemerintah memberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diresmikan pada tanggal 7 Juli 2006. Kurikulum itu mengakomodir kebutuhan setiap daerah (desentralisasi). Guru dan sekolah diberikan otonomi untuk mengembangkan kurikulum sesuai

dengan potensi sekolah, permasalahan sekolah dan kebutuhan sekolah disetiap daerah.

KTSP tahun 2006 ini mempunyai arti bahwa setiap satuan pendidikan harus mampu mengembangkan komponen-komponen dalam KTSP. Komponen KTSP mencakup visi, misi, tujuan tingkat satuan pendidikan, struktur, muatan, kalender pendidikan, silabus sampai pada rencana pelaksanaan pembelajaran.

KTSP pada dasarnya bertujuan membuat siswa dan guru lebih aktif dalam pembelajaran. Guru dituntut kreatif membuat metode untuk merangsang siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran, sehingga komunikasi dua arah terjadi dengan sangat dinamis dan pembelajaran tidak lagi dipandang membosankan karena guru hanya memakai satu metode.

Kelebihan lain KTSP adalah memberi alokasi waktu pada kegiatan pengembangan diri siswa. Siswa tidak selalu mendapatkan teori di kelas, tetapi siswa diajak terlibat langsung dalam proses pengalaman belajar.

Konsekuensi dari KTSP adalah menuntut setiap satuan pendidikan (sekolah) untuk membuat kurikulum yang berbeda antar satuan pendidikan. Sekolah diberikan tuntutan dan kebebasan dalam penyusunan kurikulum akan tetapi proses penyusunannya harus mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lanjutan (SKL) yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 22 dan 23 Tahun 2006, serta acuan pelaksanaan SI dan SKL yang tertuang dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2006.

Dalam KTSP ini guru diberi otonomi dalam menjabarkan kurikulum dan murid sebagai subjek dalam proses pembelajaran, dari situlah diharapkan implementasi KTSP dapat memenuhi kebutuhan siswa di setiap sekolah. Namun masalahnya guru belum terbiasa diberi kebebasan dalam menjabarkan dan mengembangkan kurikulum.

Dengan melihat perubahan kurikulum pada tiap periodenya maka jelas bahwa kurikulum di Indonesia selalu mengalami perubahan dengan disesuaikan terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan berdasarkan penelitian pelaksanaan KTSP tidak dibarengi dengan kemampuan guru dalam implementasinya di lapangan.

Dengan dibelakukannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini perlu adanya monitoring dari berbagai pihak, karena dalam pengembangannya harus disesuaikan dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 pasal 17 ayat 1.

Dengan dasar pokok-pokok pemikiran di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui pengetahuan guru pada implementasi kurikulum terutama pada materi pelajaran geografi, sehingga skripsi ini berjudul : **“Pengetahuan Guru Geografi Sekolah Menengah Atas Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Kota Bandung”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai arah pembatas ruang lingkup penelitian, adalah:

1. Bagaimanakah pemahaman guru geografi di SMA Kota Bandung terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ?
2. Bagaimanakah keterampilan guru dalam mengembangkan silabus geografi ?
3. Bagaimanakah keterampilan guru dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran geografi (RPP) ?
4. Upaya apakah yang dilakukan oleh guru dalam mengatasi hambatan dalam implementasi pembelajaran mata pelajaran Geografi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan-tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemahaman guru geografi mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Mengetahui keterampilan guru dalam mengembangkan silabus geografi.
3. Mengetahui keterampilan guru dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) geografi.
4. Mendapatkan solusi yang dilakukan guru dalam mengatasi hambatan dalam KTSP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber teori untuk penelitian lebih lanjut mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk dapat :

- a. Menganalisis optimal sejauh mana optimalisasi KTSP pada mata pelajaran geografi.
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman guru yang lebih luas tentang KTSP.
- c. Mendapatkan gambaran pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
- d. Mengidentifikasi faktor penghambat di dalam pelaksanaan KTSP.
- e. Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai salah satu aspek yang penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan demikian, diharapkan peneliti sebagai calon guru geografi siap melaksanakan tugas sesuai kebutuhan dan perkembangan Zaman.



## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran terhadap beberapa istilah dalam judul, penulis memberikan penjelasan sebagai berikut :

### 1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Istilah kurikulum pada zaman Yunani kuno, berasal dari kata “*Curere*” yang berarti “tempat pertandingan”. Kurir adalah pelari yang bertugas menyampaikan berita dari satu tempat ke tempat lain. Kurikulum diartikan “jarak yang ditempuh dalam suatu perlombaan lari” atau “*rara course*”. Analog dengan makna tersebut, kurikulum dalam pendidikan, diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran dan materi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah tertentu. (Darsono, 2006:126)

Selain itu para ahli kurikulum juga memberikan definisinya, dalam bukunya Darsono (2006:127) mengemukakan ada beberapa pengertian kurikulum, diantaranya menurut Mcdonal (1965) menyatakan bahwa ‘kurikulum sebagai rencana kegiatan untuk menuntun pengajaran. Menurut Beauchamp (1981) kurikulum diartikan dokumen tertulis yang memuat rencana untuk peserta didik selama belajar disekolah, dan Taba (1962) mengartikan kurikulum sebagai rencana untuk membelajarkan peserta didik’.

Ahli kurikulum lainnya Mauritz Johnson dalam bukunya Sukmadinata (2004:4), kurikulum “*Prescribes (or at least anticipates) the result of instruction*” ‘kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan, memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis, lingkup dan urutan isi proses

pendidikan. Jadi kurikulum adalah suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan pembelajaran’.

Sedangkan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006:5) “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan pada masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan silabus. (BSNP, 2006:5).

## 2. Kompetensi Guru Geografi dalam KTSP

Kompetensi guru menggambarkan tentang kemampuan yang dituntutkan kepada seseorang yang memangku profesi sebagai guru. Menurut Usman (1990: 1) kompetensi guru berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif, sedangkan guru merupakan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama. Empat kompetensi

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

### 3. Silabus

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian (BSNP, 2006: 14).

### 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan Standar Isi dan dijabarkan dalam Silabus (Mulyasa, 2006:212)

